

Pergeseran paradigma dalam kebijakan publik

ASPEK	GOVERNMENT	GOVERNANCE
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">❖ Pemerintah❖ Stakeholder❖ Analisis Kebijakan❖ Independent Think Tank
PENETAPAN KEBIJAKAN	Pemerintah	Pemerintah
ANALISIS KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">○ Pemerintah○ Public Contractor○ Government Think Tank	<ul style="list-style-type: none">❖ Stakeholder❖ Analisis Kebijakan❖ Independent Think Tank

Aktor-aktor Dlm Perumusan Kebijakan

- Para pemeran serta resmi: agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif.
- Pemeran serta tdk resmi: kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, warganegara individu.

Badan-badan administrasi

- Hal ini berkaitan erat dg pemahaman kebijakan sbg apa yg dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah ttt.
- Badan-2 administrasi juga menjadi sumber utama mengenai usul-usul pembuatan UU dlm sistem politik, bahkan juga scr aktif melakukan lobi dan menggunakan tekanan-2 dlm penetapan UU.

Presiden (eksekutif)

- Keterlibatan presiden dlm perumusan kebijakan dpt dilihat dlm rapat-rapat kabinet. Bahkan presiden terlibat scr personal dlm perumusan kebijakan.
- Presiden juga membentuk komisi penasehat yg terdiri dr warganegara maupun pejabat-pejabat yg ditunjukan utk menyelidiki kebijakan ttt dan mengembangkan usul-usul kebijakan.

Lembaga Yudikatif

- Lembaga ini mempunyai kekuasaan yg cukup besar utk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali (peninjauan yudisial) suatu UU atau peraturan.
- Tinjauan yudisial mrpk kekuasaan pengadilan utk menentukan apakah tindakan-2 yg diambil oleh cabang-2 eksekutif maupun legislatif sesuai konstitusi atau tdk.

Lembaga Legislatif

- Setiap UU menyangkut persoalan-2 publik hrs mendapatkan persetujuan dr lembaga legislatif.
- Keterlibatan lembaga legislatif dlm perumusan kebijakan dpt dilihat dr mekanisme dengar pendapat, penyelidikan-2 dan kontak-2 yg mereka lakukan dg pejabat-2 administratif, kelompok-2 kepentingan dll.

Kelompok Kepentingan

- Kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan (menyatakan tuntutan-2 dan memberikan alternatif-2 tindakan kebijakan).
- Memberikan informasi kpd para pejabat publik mengenai sifat serta konsekuensi-2 yg mungkin timbul dr usul-2 kebijakan yg diajukan.
- Kelompok kepentingan memberikan sumbangan yg berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan publik.

Partai-Partai Politik

- Partai politik pada dasarnya lebih berorientasi kpd kekuasaan dibandingkan dg kebijakan publik. Tapi dlm masyarakat modern, partai politik seringkali melakukan agregasi kepentingan (berusaha utk mengubah tuntutan-2 ttt dr kelompok-2 kepentingan mjd alternatif kebijakan).

Warganegara Individu

- Individu warganegara dpt mengambil peran aktif dlm pembuatan kebijakan melalui pemilu.
- Melalui pemilu warganegara memilih para pembentuk kebijakan puncak. Shg pemilu mrpk metode yg penting dr pengaruh warganegara dlm pembentukan kebijakan krn hal ini memungkinkan warganegara utk memilih para pejabat dan sedikit banyak menginstruksikan pejabat-2 ini mengenai kebijakan ttt.

Formulasi Kebijakan Publik

- PERUMUSAN MASALAH.
- AGENDA SETTING.
- POLICY PROBLEM FORMULATION.
- POLICY DESIGN.